

PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PASANGAN IDRIS-IMAM DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020

Intan Rizkika Permatasari¹, Arry Bainus², Idil Akbar³

Universitas Padjadjaran, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: kika.bayuaji@gmail.com

ABSTRAK

Pada arena kontestasi politik, kepemilikan modal sosial menjadi hal yang utama, karena pilkada bukan merupakan ajang persaingan antar parpol melainkan kandidat yang menjadi actor kunci. Pemanfaatan modal sangat umum digunakan dalam suatu pemilihan, karena modal memberikan kekuatan untuk seorang kandidat memenangkan pertarungan politik. Latar belakang sosial seperti Pendidikan, pengalaman pekerjaan, sosok ketokohan, dan popularitas menjadi modal sosial yang dimiliki. Selain itu habitus yang menggambarkan kultur, harkat, karakter, serta keinginan dari suatu golongan tertentu yang dijadikan panutan dari kelompok kecil dapat dikembangkan dengan keahlian dan menjadi asas jatidiri seseorang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data hasil wawancara virtual, bahan pustaka, media cetak dan elektronik serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian dan dilakukan melalui triangulasi sumber yang menghasilkan penelitian bahwa pasangan Idris-Imam memanfaatkan modal sosial guna memenangkan pemilihan Walikota Depok Tahun 2020 dengan memanfaatkan ketokohan, jaringan, organisasi sosial, serta identitas yang melekat pada habitus actor.

Kata Kunci: *Pemilihan Walikota; Pemanfaatan Modal; Modal Sosial; Habitus.*

ABSTRACT

In the arena of political contestation, ownership of social capital becomes the main thing, because the regional election is not a competition between political parties but candidates who are key actors. Utilization of capital is very commonly used in an election, because capital gives a candidate the power to win a political battle. Social background such as education, work experience, character figures, and popularity become social capital they have. In addition, habitus which describes the culture, dignity, character, and desires of a certain group that is used as a role model for small groups can be developed with expertise and become the basis of one's identity. This study uses a descriptive qualitative method with data sources from virtual interviews, library materials, print and electronic media as well as other data sources related to research and is carried out through triangulation of sources which results in research that the Idris-Imam couple utilizes social capital to win the Depok Mayor election in 2013. 2020 by utilizing

figures, networks, social organizations, and identities attached to the habitus of actors.

Keywords: *Mayor Election; Capital Utilization; Social Capital; habit.*

PENDAHULUAN

Ajang kontestasi pemilihan diselenggarakan setiap lima tahunan merupakan implementasi dari demokrasi. Sebagai penilaian pelaksanaan kehidupan demokrasi masyarakat di daerah, dapat dilakukan dengan memilih kepala daerah. Pada tahun 2020 untuk pertama kalinya Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemic Covid-19.

Urgensi Pemilihan Serentak 2020 ini tetap harus dilakukan, karena: (1). Disepakatinya keputusan politik bersama antara Komisi Pemilihan Umum(KPU), Pemerintah, dan DPR RI atas beberapa pilihan yang ditawarkan oleh KPU, dimana KPU menawarkan tiga opsi hari pemungutan suara; (2). Sebagai wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan demokrasi walaupun pada kondisi pandemic seperti negara lain di dunia; (3). Di dunia Internasional, pemilu yang berlangsung secara terjadwal merupakan penentu indeks demokrasi dari sebuah negara. Indeks ini setiap tahun dirilis oleh *Economist Intelligent Unit (EIU)*. Indeks demokrasi selanjutnya digunakan oleh berbagai negara dan lembaga internasional termasuk para investor, dalam menilai sebuah negara; (4). Untuk menyusutkan praktek pemerintah daerah yang kebanyakan dipimpin oleh Pejabat Sementara/ Pelaksana Tugas

(PLT) yang kewenangannya terbatas, sementara disaat pandemic sangat diutuhkan seorang pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat; (5). Pemilihan Serentak 2020 di 270 daerah, apat menjadi ajang untuk menetapkan kultur baru, yaitu beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu produktif dana man Covid-19 dengan protocol ketat dan khas di sektor pemilu; dan (6). Pemilihan Serentak 2020 dilaksanakan untuk memacu pemulihan kondisi sosial serta perekonomian di daerah dan nasional akibat pandemi.(Perppu No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 2020)

Pemilihan Walikota Depok pada tahun 2020 adalah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota dan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 yang semula dijadwalkan tanggal 23 September 2020. Tercatat sebanyak 1.229.362 daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah TPS 4.015 yang tersebar di 63 kelurahan.(Dukcapil, 2020)

Pemilihan Walikota Depok tahun 2020 merupakan ajang pemilihan yang dilakukan secara langsung dipilih oleh

masyarakat dan sudah digelar keempat kalinya. Duel yang diikuti dua pasangan calon yang merupakan petahana Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kandidat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020

NO	Nama Paslon	Partai Pengusung
1.	Pradi Supriatna & Afifah Alia	Koalisi Depok Bangkit (Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, PKB, PSI)
2.	Mohammad Idris & Imam Budi Hartono	Koalisi Tertata Adil Sejahtera (PKS, Demokrat, PPP)

Sumber: KPU Kota Depok, 2020

Sudah 3 periode pemilihan menghasilkan kemenangan petahana. Dalam ranah kontestasi, jabatan petahana sangat sulit dikalahkan. Penelitian ini akan memfokuskan membahas fenomena yang terjadi pada pemilihan Walikota langsung di tahun 2020 di Kota Depok dengan dua pasangan calon yang merupakan petahana Walikota dan Wakil Walikota yang sama-sama saling klaim atas keberhasilannya pada periode terdahulu yang ditunjukkan oleh pendukungnya. Berdasarkan data KPU Kota Depok, berikut hasil rekapitulasi perhitungan suara:

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Walikota Depok Tahun 2020

NO	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah	Prosentase
1.	Pradi Supriatna & Afifah Alia	332.689	44,46%
2.	Mohammad Idris & Imam Budi Hartono	415,657	55,54%

Sumber: KPU Kota Depok, 2020

Mohammad Idris- Imam Budi Hartono unggul dengan 82,968 suara dari pasangan lawan Pradi Supriatna-Afifah Alia. Hal ini juga diiringi dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat Kota Depok yang mencapai 62,79 % dibanding pemilukada sebelumnya pada tahun 2015.(Lingga, 2020) Pemilukada yang digelar bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, tidak menyusutkan niat masyarakat Kota Depok untuk menggunakan hak suaranya.

Figur Idris yang merupakan Walikota Depok periode sebelumnya dan figur Imam yang merupakan tokoh politik yang aktif sejak tahun 1999 sangat dikenal di Kota Depok menjadi salah satu keunggulan pasangan ini untuk memenangkan pemilihan serentak di Kota Depok. Cara pandang masyarakat untuk menilai pasangan ini serta menghasilkan dukungan untuk mereka dipengaruhi hal tersebut. Kelebihan keduanya merupakan salah satu kepemilikan modal sosial, dimana modal sosial menjadi hal utama yang biasa dimainkan oleh pasangan calon yang ikut ajang pemilihan, diantaranya

memanfaatkan bentuk kepemilikan modal sosialnya, yaitu ketokohnya, hubungan dan jaringannya, jabatan serta prestasi kerjanya, organisasi sosial dan kelompok sosialnya, dengan memanfaatkan habitus dan ranahnya.

Fokus pada kajian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan modal sosial pasangan Idris-Imam pada pemilihan Walikota Depok Tahun 2020 ini, dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu dengan gagasan rancangan yang dimanfaatkan tertentu pada modal sosial, dan habitus. Riset ini bertujuan untuk mengetahui dan menjabarkan bentuk modal sosial pasangan Idris-Imam dan bagaimana bentuk sosial ini mereka manfaatkan untuk mendapatkan dukungan demi meraih kemenangan. Dan menambah wawasan pengetahuan mengenai modal yang dikembangkan dengan konsep habitus.

KAJIAN PUSTAKA

Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan demokrasi perwakilan, pemilu menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat, serta merupakan ajang masyarakat untuk turut serta menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Pemilihan umum juga menjadi salah satu cara masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan sistem politik yang berlaku.

Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum cara atau proses seleksi dan pelimpahan wewenang atau menyerahkan kedaulatan kepada

seseorang atau partai terpercaya (Surbakti, 1992). Dan untuk mendukung otonomi daerah, dilakukan perubahan amandemen undang-undang pada sistem ketatanegaraan yang berhubungan dengan pengisian jabatan kepala daerah terjadi, yang didalamnya disebutkan bahwa Gubernur Bupati dan Walikota sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4 Tentang Pemerintah Daerah, 1959).

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses politik demokratis, yang transparan, dan bertanggung jawab, dan dapat membuka ruang partisipasi politik bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan memilih langsung pemimpin daerahnya. (Aminah, 2016)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah memiliki tujuan diantaranya : mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, sebagai legitimasi dan kedudukan kuat dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD, dan mencegah terjadinya politik uang. (Rozali, 2005) disamping itu juga memiliki tujuan ideal, yakni menghasilkan kepala daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, moral serta kepribadian yang baik, karena idealnya pasangan terpilih adalah orang yang dikenal dan mengenal rakyatnya dan daerahnya, serta memiliki ikatan emosional yang kuat dan pasangan yang dikehendaki rakyatnya, selain itu untuk mempercepat konsolidasi demokratisasi serta melaksanakan tata

kelola pemerintahan yang baik, rakyatnya akan dapat terlibat langsung dalam proses memberikan masukan kebijakan yang akan dibuat dengan demikian ini menjadi salah satu bukti daerah telah memiliki otonomi yang dapat mengatur pemerintahannya sendiri.

Modalitas dalam Kontestasi Politik

Proses demokrasi pada kontestasi politik, seseorang dapat memenangkan ajang pemilihan manakala memiliki modal yang kuat. Kepemilikan modal menjadi hal yang sangat penting, karena ajang pemilihan bukan ajang persaingan antar partai, melainkan kandidat. Kandidat yang biasanya akan sukses adalah putra daerah yang berkuasa, atau biasanya mantan birokrat, memiliki kekayaan atau dari kalangan pengusaha, namun tidak jarang juga politisi partai yang dapat memobilisasi sumber daya serta jaringan pribadi. Modal sosial juga menjadi faktor yang paling dominan digunakan sebagai strategi kemenangan, kemudian kekuatan koalisi parpol pengusung yang sangat berpengaruh dan berperan optimal serta daya tarik sosok ketokohan sebagai petahana yang dikenal sangat baik akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. (Hidayat, 2015)

Selain kepemilikan modal hal penting lainnya agar kemenangan dapat diraih pada suatu ajang pemilihan dibutuhkan cara bagaimana modal tersebut dimanfaatkan. Selain modal memiliki peran sebagai hubungan

sosial yang berada pada satu sistem pertukaran, sebutan ini juga diperluas dengan segala bentuk baik materiil ataupun simbolik dengan tidak adanya perbedaan yang menunjukkan dirinya sebagai suatu yang layak untuk dicari pada sebuah bentuk sosial tertentu. (Pierre Bourdieu, 1986) Dan bila dilihat dari basis dominasi, jenis modalitas dapat ditukar dengan jenis modal lainnya. Menurut (P Bourdieu & Richardson, 1986) Modal digolongkan menjadi empat bagian;

Modal Ekonomi

Dalam suatu kontestasi pilkada, modal ekonomi juga dibutuhkan para actor politik sebagai dukungan berupa dana yang berasal dari pribadi maupun donator, dan akan dipergunakan untuk membayar operasional yang mendukung parpol, kampanye, dan sebagainya yang berhubungan demi kemenangan dalam pemilihan. Modal ekonomi sendiri, diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis berupa uang, dan modal ini paling mudah ditukar ke modal lainnya. (Marijan, 2015).

Modal Budaya

Modal budaya dikenal sebagai modal yang dimiliki dalam pribadi seseorang berupa wawasan pengetahuan yang bernilai kebudayaan, dan memiliki fungsi sebagai hubungan sosial pada suatu system ekonomi serta menjadi penentu kedudukan sosial seseorang dengan ketentuan seseorang mempunyai wawasan objektif

mengenai seni dan budaya, lalu memiliki citra rasa budaya dan preferensi, serta memiliki kemampuan budayawi dan wawasan praktis, dan sebagainya.

Modal Sosial

Menurut Bourdieu dalam buku (Asquith, 2019) modal sosial merujuk pada sumber daya yang memiliki kekuatan actual dan berpotensi yang dimiliki seseorang, seperti jaringan, normal, dan sikap saling percaya, yang berlangsung terus menerus dan diakui dan ada timbal balik berupa dukungan kolektif. Pada kontetasi pilkada kepercayaan kepada masyarakat yang akan memilihnya, serta sejauh apa paslon mampu meyakinkan pemilih dengan pertimbangan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki untuk memimpin daerahnya dibutuhkan untuk dapat meyakinkan pemilih, sehingga paslon harus dikenal masyarakat.

Bourdieu menegaskan bahwa modal sosial akan membidik pada manfaat dan kesempatan seseorang pada suatu masyarakat dengan lingkungan sosial tertentu. Kepemilikan latar belakang sosial seorang paslon serta popularitas menjadi modal sosial penting yang dimiliki kandidat untuk membangun hubungan dan kepercayaan public, karena kepercayaan masyarakat merupakan landasan utama untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan. Latar belakang yang

dimaksud disini meliputi pendidikan, pengalaman pekerjaan, figure ketokohan yang disematkan, missal tokoh ulama, tokoh adat, tokoh politik dan sebagainya). Pengaruh latar belakang sosial inilah yang akan menentukan kemenangannya dalam ajang pemilihan, dimana ini akan berpengaruh besar untuk kandidat membangun relasi serta kepercayaan masyarakat.

Para pakar mengartikan modal sosial sebagai berikut: *pertama* jaringan hubungan sosial, *kedua* menekankan keunikan yang menyatu pada individu seseorang yang terlibat dalam suatu interaksi sosial. Robert Putnam berpendapat modal sosial yakni sebagai sebuah kepercayaan antar masyarakat, masyarakat dengan pimpinannya, dan menjabarkan modal sosial sebagai lembaga sosial yang melibatkan jaringan, dan kepercayaan publik, yang memotivasi kerjasama sosial untuk kepentingan bersama, hal ini berarti bahwa jaringan sosial dibutuhkan dalam masyarakat dan norma aturan untuk menggerakkan produktivitas. Modal sosial juga diegaskan mengacu pada jaringan sosial yang dimiliki actor dalam hubungannya dengan pihak lain yang berkuasa dan masyarakat kelompok sosial tertentu seperti arisan, komunitas, asosiasi, dan lainnya. (Pierre Bourdieu, 1986)

Modal Simbolik

Modal simbolik memiliki peran memantapkan relasi kuasa pada system

dan struktur masyarakat. Modal ini merupakan modal penunjang pada kontestasi politik, dan menjadikannya semua jenis sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk mencapai kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik yang dibutuhkan berupa jabatan, barang mewah, gelar kebangsawanan, status sosial, leuarga terpendang, dan lainnya yang diakui oleh kelompok institusi maupun non institusi.

Beberapa penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa modal yang mendominasi sebagai strategi pemenangan, adalah modal sosial dan politik dimana pemanfaatan kekuatan koalisi parpol pengusung sangat berpengaruh dan berperan optimal untuk daya tarik figure petahana untuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat. (Hidayat,2015) Sementara pada penelitian yang dilakukan (Brando Wanta, 2018) pemanfaatan modal juga digunakan pasangan kandidat untuk merebut dukungan dari masyarakat pemilih dan dianggap berhasil. Lalu dalam temuan (Chairunisa et al., 2019) pemanfaatan modal dengan menggunakan jaringan pengusaha, hubungan kekerabatan juga dianggap berhasil digunakan untuk mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan dukungan suara. Kemudian hasil penelitian terdahulu lainnya, pemanfaatan jaringan organisasi sosial serta pembentukan habitus actor dan pertarungan modal actor pada ranah politik juga dianggap berhasil membuat pasangan kandidat mendapatkan kepercayaan masyarakat.

(Plaituka et al., 2018) Dan terakhir penelitian yang menghasilkan pemanfaatan modal sosial yang meliputi ketokohan, kemampuan, jaringan sosial serta integritas kepercayaan dari masyarakat, serta interaksi sosial dengan pendukungnya juga berperan dalam kemenangan pasangan kandidat. (Sholihah, 2019).

Relasi modal dalam kontestasi politik, adalah kemenangan kontestasi pemilihan dipengaruhi oleh modal sosial yang ditunjukkan dengan kepemilikan modal sosial calon kandidat membuat partai besar mengusung kandidat tersebut di pilkada, serta interaksi sosial kandidat terhadap masyarakat yang sangat dekat akan menghasilkan kemudahan akses untuk mensosialisasikan visi misi kandidat ke masyarakat.

Habitus

Habitus diartikan ebagai suatu kebiasaan yang diungkapkan habitualnya atau sesuatu yang terlihat dari tampak diri, pembawaan kondisi tipe seseorang. Merujuk pada (B. Dirk et al., n.d.) Masyarakat dikelompokkan Bourdieu kelompokkan menjadi 3 kelas yakni kelas dominan, borjuasi kecil dan populer yang berdasarkan oleh modal yang dimiliki. Ketiga kelas ini memiliki hubungan dimana kelas yang berpengaruh akan selalu memaksakan budayanya, sementara kelas dibawahnya akan selalu menerima budaya kelas dominan. Habitus juga menjadi gaya hidup, nilai, karakter, serta impian suatu kelompok tertentu,

baik kelas yang berpengaruh, kelas borjuasi kecil dan kelas termasyhur. Jika seseorang atau sekelompok ingin menaikan kelasnya, maka hal yang dapat dilakukan pertama kali adalah meniru habitus kelas di atasnya. Habitus juga dikembangkan melalui pengalaman, dan dapat menjadi dasar kepribadian seseorang. (Martono, 2012)

Konsep habitus sendiri dijabarkan menjadi *Pertama*, habitus selaku suatu kondisi yang dihubungkan dengan syarat keberadaan suatu kelas. *Kedua*, habitus selaku dampak keahlian yang menjadi tindakan praktis (tidak harus disadari) yang akan menjadi suatu kemampuan yang dilihat alami serta tumbuh dalam suatu lingkungan sosial tertentu. *Ketiga*, habitus adalah pondasi pemahaman untuk mengartikan dan memperkirakan kebenaran hasil dari implementasi kehidupan yang sesuai dengan struktur objektif. *Keempat*, habitus selaku prinsip atau harkat yang implementasikan pada suatu tatanan moral yang tanpa disadari, tetapi mengatur perilaku harian, misalnya jujur, murah hati, orang yang rajin, cerdas, licik, dan lainnya. *Kelima*, habitus juga selaku pondasi dalam yang dilakukan pada suatu aktivitas penataan kembali, yang artinya suatu kehidupan tidak sepenuhnya diimplementasikan sebagai suatu keharusan, namun seseorang dapat memilih, tetapi tidak sepenuhnya bebas memilih (pilihan ditentukan oleh habitus).

Habitus juga dimanfaatkan untuk menjelaskan aturan sosial atau sikap

yang dipedomani oleh aturan pembentuknya. Pembentukannya dilakukan dengan proses terus menerus dengan suatu tindakan, pola berfikir, dan mengartikan dunia sosialnya yang akan memimpinya dalam menempuh ajang pemilihan yang dihadapinya. Habitus mempunyai proses kerja yang dapat menuntun pelaku untuk mengenali, menilai dan merasakan penghargaan ditunjukkan oleh dunia sosial karena menjadi panutan masa pendukungnya. Sementara kerangka kerja habitus didapat dari pengalaman actor saat berinteraksi baik dengan masyarakat maupun dengan lawan politiknya untuk memperoleh dukungan suara. (B. Dirk et al., n.d.)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menjabarkan bagaimana bentuk modal sosial pasangan Idris-Imam pada Pemilihan Walikota Depok Tahun 2020 dan bagaimana pemanfaatannya untuk pemenangannya pada pemilihan Walikota Depok Tahun 2020 dengan habitus yang dimiliki. Penelitian ini menyempurnakan penelitian terdahulu yang banyak mendeskripsikan pemanfaatan modal sosial untuk mendapatkan dukungan dan suara masyarakat guna memenangkan ajang pemilihan sebagai kepala daerah terpilih.

Pengamatan pemanfaatan modal sosial ini meliputi bentuk modal serta pemanfaatannya pada ajang pemilihan Walikota Depok Tahun 2020 oleh pasangan Idris-Imam yang dilihat dari figure ketokohan, hubungan dan

jaringan, jabatan serta prestasi kinerjanya sebagai petahana, organisasi sosial maupun kelompok sosialnya, dan pemanfaatan modal dari habitus serta ranah untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat yang digunakan untuk meraih kemenangan. Riset ini mengadopsi teori yang dikembangkan Pierre Bourdieu untuk mendeskripsikan kepemilikan modal serta pemanfaatan modal sosialnya.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menguraikan suatu gejala sosial yang diteliti. Sumber data untuk Terdapat dua kategori pada penelitian ini, yakni data primer dan sekunder yang berasal dari kata-kata dan tindakan, dan selebihnya data tambahan berupa catatan lapangan, yang tertulis, lengkap, luas dan mendalam diperoleh dari hasil penelitian yang terdiri dari hasil wawancara, pengamatan yang dilakukan oleh penulis tentang objek, serta kegiatan yang dilakukan selama kegiatan penelitian. (L.J. Moleong, 2005) Tujuan analisis ini adalah agar informasi yang dikumpulkan akan lebih jelas dan akurat. (Huberman & Miles, 1992) Penyortiran data pemanfaatan modalitas pasangan Idris-Imam akan mengawali prosesnya, kemudian data disajikan dalam bentuk uraian singkat hubungan antara kategori, lalu akan di cek silang antar data untuk validasi, kemudian dianalisa secara deskriptif lalu disajikan dalam bentuk naratif, dan

diakhiri pembuatan kesimpulan awal yang bersifat terbuka untuk ditinjau kembali lalu dilakukan pengecekan ulang berdasarkan catatan teknis untuk dibuat lebih merinci dan mendalam. Pengujian keabsahan data, dilakukan dengan uji validitas dengan menerapkan teknik triangulasi sumber (Sugiyono, 2016) dengan metode pengecekan data yang diperoleh dari berbagai informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan pemikiran Bourdieu tentang modal sosial yang dilihat dari hubungan relasi yang dimiliki pelaku politik baik secara personal maupun kelompok dalam berhubungan dengan pihak yang berkuasa, jati diri seseorang yang terikat pada habitus pelaku politik akan terlihat dari pengalamannya saat mengartikan kebenaran yang dihadapinya. Sehingga pelaku politik tersebut berfikir bahwa kemenangan yang dicapainya bukan hanya semata-mata dari apa yang dia punya atau mendompleng dari partai politik pengusungnya, atau organisasi sosial, melainkan kemampuan personalnya yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendukungnya.

Bagi pasangan Idris-Imam, untuk mencapai kemenangannya dibutuhkan kedekatan dan keberpihakan pada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai modalnya. Kedekatan dengan masyarakat tidak saja dilakukan secara fisik tetapi termuat dalam kebijakan,

keputusan dan suatu tindakan sosial politik. Pemilihan secara langsung, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang akan membuat semua kebijakannya menghasilkan *output* yang terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Mayoritan penduduk Kota Depok adalah beragama Islam, dan merupakan basis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung pasangan Idris-IBH pada Pemilihan Walikota Depok Tahun 2020 dan telah menghasilkan kemenangan Walikota sebanyak empat periode sehingga PKS dikenal sebagai partai ‘penguasa’ di Kota Depok. Ini yang akhirnya menjadi ranah terbentuknya ikatan emosional maupun sosial dalam memperebutkan simpati masyarakat untuk meraih dukungan suara. Persaingan *head to head* antara kedua pasangan calon cukup ketat, karena lawan Idris-IBH juga merupakan petahan Wakil Walikota Depok yang pernah mendampingi. Sebagai Wakil Walikota Depok periode sebelumnya, Pradi adalah kader PKS, yang akhirnya memilih untuk mencalonkan diri dan diusung oleh partai lain. Arena politik menjadi aktualisasi terjadinya persaingan antar pelaku untuk memperebutkan sumber daya modal yang diperoleh guna menggapai kekuasaan politik. Sementara dalam ranah, Bourdieu memandangnya secara relasional, dimana ranah merupakan jaringan relasi antar posisi yang objektif. Peranan modal modal juga dianggap sangat penting karena akan menentukan posisi

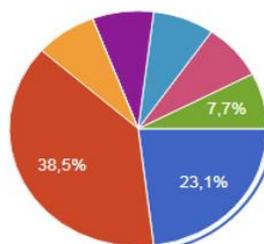
seseorang. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, maka semakin kuat posisi dan eksistensinya.

Pada kontestasi Pemilihan Walikota Depok Tahun 2020, Idris-IBH memiliki modal sosial untuk meraih dukungan masyarakat. Adapun bentuk modal sosial yang dimiliki diantaranya adalah Sosok atau ketokohan yang dikenal oleh masyarakat sebagai petahana Walikota dan dinilai berhasil dalam memimpin Kota Depok serta membawa perubahan baik mulai dari pembangunan dan pelebaran jalan, maupun tata kota yang dinilai lebih bersih dan rapih, dan menjadikan Kota Depok bernuansa Islami karena Idris juga dikenal sebagai ulama yang santun, kemudian modal berikutnya adalah hubungan dan jaringan dimana Imam adalah anggota DPRD Povinsi Jabar dan DPD PKS Kota Depok, dan telah lima periode berkiprah di pemerintahan, sehingga memiliki jaringan yang kuat di pemerintahan, dari keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai sumber daya, termasuk masyarakat Kota Depok, modal sosial lainnya yang dimiliki Idris-Imam adalah jabatan dan prestasi kerja, yang dinilai sudah berpengalaman dengan catatan keberhasilannya, catatan prestasi kerja Idris-Imam yang dinilai berhasil oleh warga Kota Depok, diantaranya kemudahan akses warga Depok dalam berobat, tata kota yang apik dan bersih, nuansa kota Islami yang makin dirasa, dan lain-lain

Idris-Imam juga memiliki modal sosial yang berasal dari organisasi sosial dan kelompok sosialnya, Idris yang menjadi Sekjen MUI Depok secara aktif turun tangan langsung dalam membantu menyelesaikan masalah sosial di Kota Depok. Idris juga mendirikan Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) yang mana ia juga menjabat sebagai Sekjen yang memiliki misi untuk menyamakan persepsi para dakwah. Sementara Imam pun sangat aktif dalam berbagai organisasi, beberapa organisasi yang diikuti di bidang politik mengharumkan namanya, Imam juga aktif dalam organisasi bidang kepemudaan ssebagai contoh, beliau menjadi Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, kemudian di bidang olah raga, Imam didaulat sebagai pembina di Komite Paralimpiade Nasional Indoneia dan Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Kota Depok dan PB PON Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitiannya, temuan peneliti didukung oleh beberapa pernyataan pertimbangan warga Kota Depok yang memilih kembali Idris sebagai petahana, yang terangkum dalam diagram dibawah ini:

Diagram 1. Pertimbangan warga Kota Depok untuk memilih Idris-Imam



Sumber: diolah peneliti, 2021

Penjelasan pada diagram diatas sebanyak 38.5% warga memilih karena faktor modal sosial ketokohan yang dikenal masyarakat, sebanyak 23.1% warga memilih karena faktor modal pengalaman dan prestasi kinerjanya, dan terdapat 5 faktor alasan lain yang berjumlah masing-masing 7.7%. Alasan lain tersebut diantaranya adalah faktor hubungan modal hubungan dan jaringannya, faktor tim pemenangan dan parpol pengusung, karena faktor kekerabatan, serta faktor kepercayaan yang telah lama dimata masyarakat.

Pemanfaatan modal sosial yang digunakan Idris-Imam pada pemilihan Walikota Depok 2020 *pertama* adalah sebagai tokoh ulama, Idris menyempatkan bekegiatan di salah satu Masjid di Kecamatan Bojongsari dan Sawangan, Idris melakukan silaturahmi dengan masyarakat dengan menjadi khutbah, melakukan sholat subuh berjamaah, menjadi khotib Jumat dan melakukan pertemuan bersama masyarakat, ketua RT dan RW alim ulama, dan pemuda. Hal ini sesuai

dengan konsep ranah yang dirumuskan Bourdieu sebagai ruang atau arena dalam suatu masyarakat. Beberapa ragam arena dapat digunakan diantaranya arena politik, arena perdagangan atau bisnis, arena pendidikan, arena kesenian, dan lain-lain. Sesuai pemikiran yang diutarakan Bourdieu ranah diartikan selayaknya kawasan yang kuat dimana didalamnya terdapat usaha untuk memperebutkan sumber daya berupa modal dan untuk mendapatkan jalan tertentu yang berhubungan dengan kedudukan kekuasaan. Idris dikenal pribadi yang santun dan agamis dimata masyarakat, berkat pemanfaatan modal sosialnya pada arena kegiatan di Masjid sehingga hal ini dinilai efektif.

Sewaktu Idris menjabat menjadi Walikota periode sebelumnya, beliau melakukan suatu program yang cukup unik dalam mengajak warganya agar tertib berlalu lintas. Sebuah lagu yang dinyanyikannya berjudul “hati-hati” diggaungkan dan diputar di salah satu lampu merah yang terletak di Simpang Ramanda. Lagu tersebut sangat khas dan terngiang di telinga masyarakat Kota Depok. Menurut pemahaman Bordieu, habitus diperoleh dari keahlian atau kemampuan yang menjadi tindakan praktis, baik secara sadar maupun tidak, dan dilihat sebagai suatu keterampilan yang terlihat alami dan berkembang dalam wilayah sosial tertentu. Kesamaan habitus pada suatu komunitas menjadi dasar perbedaan gaya hidup pada suatu masyarakat. (Haryatmoko, 2014) Cara kerja habitus

ini akan memandu pelaku untuk mengingat, menilai dan merasakan penghargaan yang ditunjukkan oleh masyarakat sosial karena menjadi panutan bagi masa dan pendukungnya.

Peneliti memahami bahwa modal sosial menjadi salah satu faktor yang memenangkan pasangan Idris-Imam, baik meraih dukungan, simpati serta suara dari masyarakat. Diantara faktor lainnya, modal sosial merupakan modal yang besar dan utama bagi pasangan Idris-Imam untuk mengikuti kontestasi politik pada pemilihan Walikota, karenanya mereka memiliki tempat khusus di hati masyarakat.

Pemanfaatan modal sosial tidak saja dilakukan oleh Idris-Imam, namun tim pemenangan pun ikut memiliki peran dalam mensosialisasikan figure kedua kandidat. Tim pemenangan bekerjasama dengan kandidat yang memang sudah memiliki kemampuan yang diakui sehingga ini memudahkan untuk pencitraan yang dikemas apik oleh tim pemenangannya. Keseluruhan nilai jual kandidat yang meliputi kepribadiannya, ketokohnya, prestasi dan hasil kinerja yang pernah dilakukannya untuk Kota Depok sangat besar sehingga mampu meraih simpati dari masyarakat dan memberikan kepercayaan penuh untuk memilihnya kembali, ini tidak lepas dari pengalaman keduanya saat masih aktif sebagai Walikota periode sebelumnya dan tokoh politik aktif yang dilakukan Imam.

Melalui dukungan partai politik pengusung yang tergabung dalam Koalisi Tertata Adil Sejahtera, modal sosialnya dimanfaatkan pasangan Idris-Imam untuk menjual figure serta jaringan relasi yang dimilikinya. Dan sebagai mesin penggerak mobilisasi, dukungan partai pengusung dan tim pemenangan dilakukan dengan cara penyebarluasan modal sosial yang dimiliki Idris-Imam secara massif, terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan pencapaian pasangan Idris-Imam dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Ajang kontestasi pemilihan Walikota secara langsung membuktikan sejauh apa usaha mereka dalam memperebutkan dan mempertahankan dukungan suara. Seorang actor politik harus mempersiapkan diri saat mencalonkan diri pada ajang pemilihan dengan kepemilikan modal untuk dapat bersaing dengan lawan politiknya. Semakin banyak dan besar modal yang dimiliki, maka peluang kemenangan pun semakin besar. (Marijan, 2015)

Pemanfaatan modal sosial yang kerap digunakan dengan figure ketokohan Idris-Imam, hubungan dan jaringan Idris-Imam, serta prestasi Idris-Imam, dan kepemilikan organisasi sosial dan kelompok sosial Idris-Imam, dan pemanfaatan modal sosial yang dilihat dari ranah dan habitusnya telah dijabarkan oleh penulis, sehingga menghasilkan kesimpulan dari hasil

data primer dan sekunder yang diperoleh penulis, dilakukan pengecekan dengan berbagai informan melalui tehnik triangulasi sumber, kemudian diperoleh kesamaan data dan dinyatakan keabsahannya. Berbagai informasi yang diperoleh dari warga masyarakat Kota Depok yang memilih pasangan Idris-Imam menyatakan berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki Idris-IBH sebagai modal sosialnya yang mempengaruhi keberhasilannya meraih dukungan dan meyakinkan masyarakat untuk memilihnya. Dan hal ini pun dibenarkan oleh informan lainnya Tim Pemenangan pasangan Idris-Imam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2016). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (p. 192). Prenadamedia Group.
- Asquith, L. (2019). *Bourdieu and Social Capital*. In *Rebuilding Lives After Genocide* (pp. 27–45).
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-14074-8_2
- B. Dirk, N., Eley, G., & B Ortner, S. (n.d.). *Structure, Habitus, Power: Basis for a Theory of Symbolic Power*. In *Culture/Power/History: A Reader in Contemporary Social Theory*. Princeton University Press.
- Bourdieu, P., & Richardson, J. (1986). *The Forms of Capital*. In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of*

- Education (p. 241). Greenwood press.
- Bourdieu, Pierre. (1986). *The Form Of Capital*. In J.G. Richarson (ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press, hlm.
- Chairunisa, W., Putri, I. A., & Anggraini, D. (2019). *Pemanfaatan Modal Sosial Deri Astadan Zohirin Sayuti Pada Pilkada Sawahlunto Tahun 2018*. Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal, 1(1), 101–113. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.101-113.2019>
- Dukcapil. (2020). *DPT Pilih*. Kemendagri.Go.Id. <https://dukcapil.kemendagri.go.id>
- Haryatmoko. (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kompas.
- Hidayat, M. (2015). *Strategi Sosial Pemenangan Vonnie Anneke-Joppi Lengkong pada Pilkada di Kabupaten Minahasa Utara*.
- Lingga, R. (2020). *Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Depok 2020 Meningkatkan 62,79 Persen, Tertinggi Ada di Wilayah Sawangan*. M.Rri.Co.Id. <https://m.rri.co.id/go/vzwtivy>
- Marijan, K. (2015). *Sistem Politik Indonesia* (Fourth ed, p. 184).
- Martono, N. (2012). *Perspektif Klasik, Posmodern, dan Poskolonial*. In Sosiologi Perubahan Sosial (Revisi, pp. 1–479). PT. Raja Grafindo Persada.
- Perppu No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 1 (2020).
- Rozali, A. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Rajawali Pers.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik* (p. 261).
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 4 Tentang Pemerintah Daerah, (1959). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>